

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensional di Indonesia. Meskipun berbagai indikator ekonomi makro menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Huraerah, 2013). Selama ini, kemiskinan sering diukur berdasarkan pendekatan moneter yang menitikberatkan pada tingkat pendapatan atau pengeluaran rumah tangga (Muslih, 2024). Namun, pendekatan tersebut masih bersifat reduksionis karena memandang kemiskinan semata-mata sebagai keterbatasan ekonomi, padahal kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh dimensi nonmoneter. Akibatnya, pengukuran yang hanya berfokus pada indikator uang berpotensi mengabaikan aspek manusia seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup.

Kenyataannya, terdapat rumah tangga yang secara statistik tergolong tidak miskin karena memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, tetapi secara kualitas hidup masih menghadapi berbagai keterbatasan mendasar, seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara status ekonomi moneter dengan realitas kesejahteraan yang dialami masyarakat, sehingga kemiskinan perlu dipahami sebagai fenomena multidimensi yang mencerminkan berbagai bentuk deprivasi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kemiskinan multidimensi tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan dasar, tetapi juga

berkaitan dengan kerentanan pekerjaan informal yang menyebabkan pendapatan rumah tangga tidak stabil, kepadatan penduduk yang meningkatkan tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, serta guncangan harga pangan yang secara langsung memengaruhi daya beli dan ketahanan konsumsi rumah tangga.

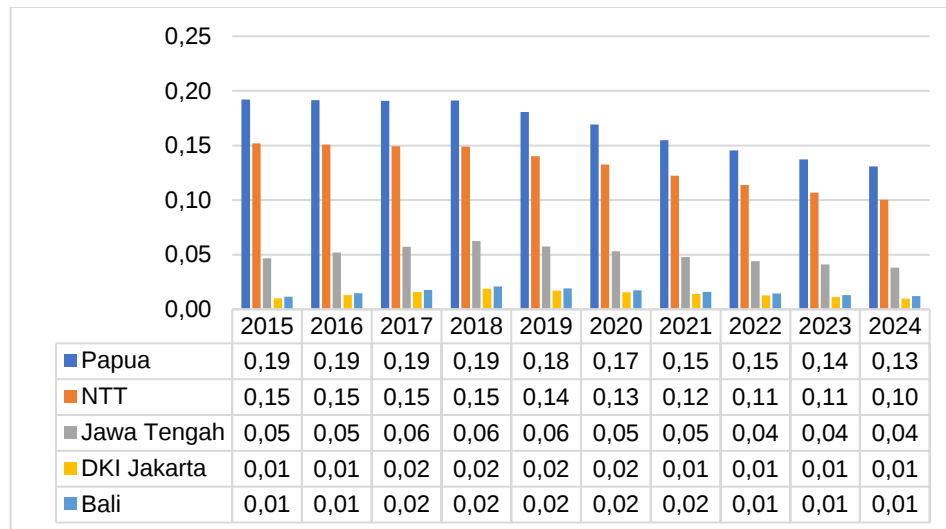
Pendekatan kemiskinan multidimensi memandang kemiskinan sebagai kondisi kekurangan dalam berbagai dimensi kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Baling, 2012). Pendekatan ini sejalan dengan instrumen global berupa *Multidimensional Poverty Index (MPI)* yang dikembangkan oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative bersama United Nations Development Programme, yang mengukur kemiskinan melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup untuk memberikan gambaran kesejahteraan secara lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan tidak hanya melihat kemampuan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar yang menentukan kualitas hidup (UNDP, 2024). Di Indonesia, permasalahan kemiskinan multidimensi masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional karena masih terdapat rumah tangga yang secara pendapatan tidak tergolong miskin, tetapi mengalami deprivasi pada berbagai indikator kesejahteraan dasar.

Selaras dengan hal tersebut, data Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa pada Maret 2025 tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta penduduk (BPS, 2025). Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan secara menyeluruh karena masih terdapat ketimpangan antar wilayah serta kerentanan sosial ekonomi pada kelompok masyarakat tertentu, terutama dalam akses

terhadap layanan dasar dan ketahanan hidup rumah tangga. Implikasinya, di balik penurunan angka kemiskinan secara makro, beberapa dimensi kesejahteraan seperti stabilitas pekerjaan, kepadatan hunian, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan masih berpotensi mengalami tekanan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya difokuskan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan berbagai dimensi deprivasi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, sehingga penelitian ini penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan multidimensi, khususnya kerentanan pekerjaan informal, kepadatan penduduk, dan guncangan harga pangan.

Berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan standar hidup layak turut memengaruhi dinamika kemiskinan multidimensi di Indonesia. Perubahan efektivitas kebijakan tersebut dapat diamati melalui perkembangan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang menunjukkan kondisi deprivasi masyarakat pada berbagai dimensi kesejahteraan selama periode 2015–2024. Untuk melihat perkembangan tersebut, berikut disajikan grafik Indeks Kemiskinan Multidimensi 5 Provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024.

Gambar 1 1 Grafik Indeks Kemiskinan Multidimensi



Sumber : PrakarSA, 2025

Berdasarkan grafik Indeks Kemiskinan Multidimensi tersebut, Perkembangan kemiskinan multidimensi di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari tren nasional, tetapi juga dari perbedaan antar wilayah. Berdasarkan data Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) pada beberapa provinsi selama periode 2015–2024, terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan tingkat kemiskinan multidimensi di seluruh wilayah. Provinsi Papua mengalami penurunan dari 0,19 pada tahun 2015 menjadi 0,13 pada tahun 2024, sedangkan Nusa Tenggara Timur menurun dari 0,15 menjadi 0,10 pada periode yang sama.

Sementara itu, provinsi dengan tingkat kemiskinan multidimensi menengah seperti Jawa Tengah menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah dan stabil, yaitu berkisar antara 0,04 hingga 0,06. Di sisi lain, provinsi dengan tingkat kemiskinan multidimensi terendah seperti DKI Jakarta dan Bali memiliki nilai yang sangat rendah, yaitu pada kisaran 0,01 hingga 0,02.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara umum terjadi perbaikan kesejahteraan, ketimpangan kemiskinan multidimensi antar wilayah di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak

hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak di masing-masing daerah (Setiawan & Fikriah, 2020).

Kondisi ini juga mencerminkan adanya faktor struktural yang berbeda antar wilayah, seperti tingginya proporsi pekerja sektor informal, kepadatan penduduk, serta tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga pangan, yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan multidimensi secara berbeda di setiap provinsi (Baihaqi et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan multidimensi di Indonesia.

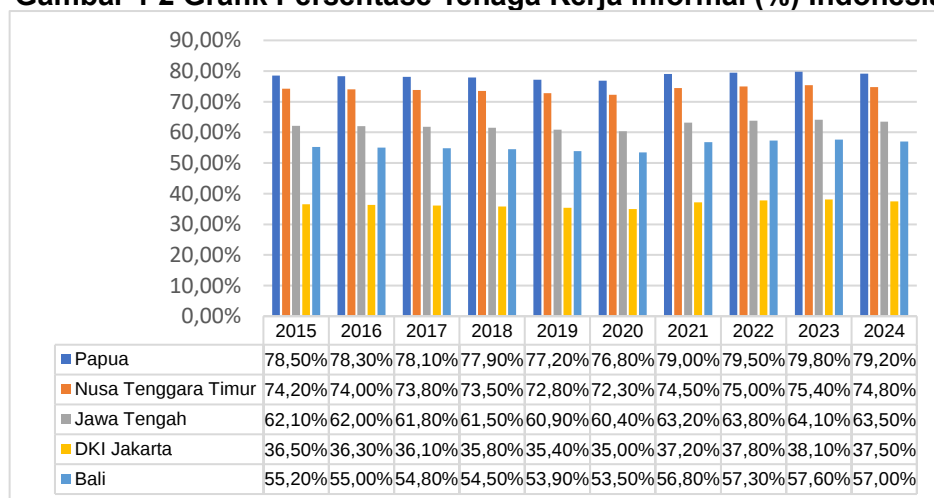
Meskipun Indeks Kemiskinan Multidimensi menunjukkan tren berfluktuasi, kondisi tersebut tetap dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang menentukan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kerentanan pekerjaan informal dipilih sebagai faktor penting karena sebagian besar pekerja pada sektor ini memiliki pendapatan yang tidak stabil dan minim perlindungan sosial, sehingga rentan mengalami deprivasi ketika terjadi tekanan ekonomi. Kepadatan penduduk juga menjadi perhatian karena tingginya konsentrasi penduduk dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta kualitas hunian. Selain itu, guncangan harga pangan relevan dikaji karena kenaikan harga kebutuhan pokok secara langsung memengaruhi daya beli rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah, sehingga berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan multidimensi.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan multidimensi adalah kerentanan pekerjaan informal. Struktur pasar tenaga kerja di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh sektor informal, yang sebagian besar ditempati oleh

pekerja dengan pendapatan tidak tetap, produktivitas relatif rendah, serta minim perlindungan sosial (Perseveranda, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan rumah tangga yang bergantung pada sektor informal lebih rentan mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga meningkatkan risiko terjadinya deprivasi dalam berbagai dimensi kesejahteraan.

Kerentanan pekerjaan informal dapat meningkatkan risiko kemiskinan karena pekerja tidak memiliki jaminan pendapatan yang stabil serta tidak memperoleh perlindungan sosial yang memadai. Dalam kondisi tersebut, rumah tangga yang bergantung pada sektor informal menjadi lebih rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya (Perseveranda, 2025). Di Indonesia, proporsi tenaga kerja informal masih tergolong tinggi dalam struktur pasar tenaga kerja. Untuk melihat perkembangan kondisi tersebut, berikut disajikan grafik persentase tenaga kerja informal di 5 Provinsi di Indonesia selama periode 2015–2025.

Gambar 1 2 Grafik Persentase Tenaga Kerja Informal (%) Indonesia



Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan grafik tenaga kerja informal tersebut, terlihat bahwa Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan data persentase tenaga kerja informal pada beberapa provinsi selama periode 2015–2024, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah. Provinsi Papua menunjukkan tingkat tenaga kerja informal tertinggi, yaitu berkisar antara 76,80% hingga 79,80%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dengan kisaran 72,30% hingga 75,40%.

Jawa Tengah berada pada kategori menengah dengan persentase sekitar 60% hingga 64%, sedangkan Bali menunjukkan tingkat yang relatif lebih rendah, yaitu pada kisaran 53% hingga 57%. Di sisi lain, DKI Jakarta sebagai wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi memiliki persentase tenaga kerja informal paling rendah, yaitu sekitar 35% hingga 38%.

Perbedaan struktur ketenagakerjaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia masih bergantung pada sektor informal, terutama di daerah dengan tingkat pembangunan yang relatif lebih rendah. Tingginya proporsi tenaga kerja informal mencerminkan kondisi pekerjaan yang tidak stabil, produktivitas rendah, serta minim perlindungan sosial, sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga (ILO, 2024).

Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya risiko kemiskinan multidimensi, karena rumah tangga yang bergantung pada sektor informal cenderung memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pekerja informal memiliki probabilitas lebih tinggi mengalami deprivasi multidimensi dibandingkan

pekerja formal (Khoiruddin et al., 2025). Oleh karena itu, variabel kerentanan pekerjaan informal menjadi penting untuk dianalisis dalam menjelaskan dinamika kemiskinan multidimensi di Indonesia.

Ketika terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga pangan atau keterbatasan akses terhadap layanan publik, rumah tangga yang bergantung pada sektor informal cenderung lebih rentan mengalami penurunan kualitas hidup meskipun secara pendapatan belum tentu berada di bawah garis kemiskinan (OECD & Organization, 2024). Dengan demikian, kerentanan pekerjaan informal menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam kajian kemiskinan multidimensi dan dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu variabel yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan multidimensi di Indonesia, bersama dengan faktor kepadatan penduduk dan guncangan harga pangan.

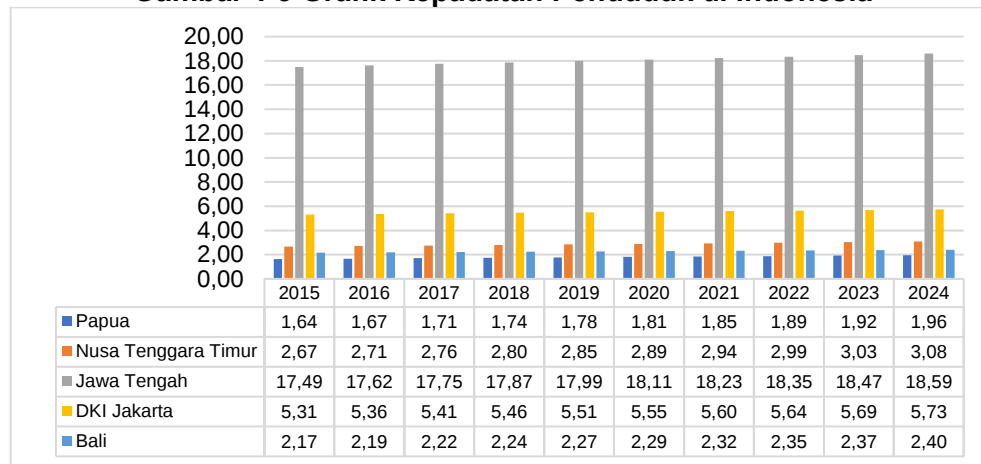
Selain faktor ketenagakerjaan, faktor demografis seperti kepadatan penduduk juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan multidimensi. Kepadatan penduduk yang tinggi tidak hanya mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah, tetapi juga menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan fasilitas dasar dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi ini penting karena keterbatasan akses terhadap perumahan layak, sanitasi, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar dapat menimbulkan berbagai bentuk deprivasi yang secara langsung menurunkan kualitas hidup rumah tangga. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi umumnya menghadapi permasalahan berupa keterbatasan hunian yang layak, akses sanitasi yang kurang memadai, serta terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan (Al-farij & Ramadani, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

kepadatan penduduk dapat memperbesar risiko kemiskinan multidimensi karena beban terhadap akses layanan dasar menjadi semakin tinggi.

Di Indonesia, distribusi kepadatan penduduk masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antar wilayah. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di daerah tertentu, terutama di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah dan DKI Jakarta, yang memiliki tingkat kepadatan relatif tinggi dibandingkan wilayah lain. Sebaliknya, provinsi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah, sedangkan Bali berada pada kategori menengah. Konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah tertentu tidak selalu diikuti oleh pemerataan akses terhadap lapangan pekerjaan, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas dasar lainnya. Dalam perspektif kemiskinan multidimensi, kondisi ini menjelaskan bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi sekalipun masih dapat memiliki kantong-kantong kemiskinan akibat keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan tingginya persaingan dalam memperoleh sumber daya.

Ketimpangan distribusi penduduk antar provinsi tersebut juga menimbulkan tekanan terhadap penyediaan lapangan kerja dan kapasitas layanan publik, sehingga berpotensi meningkatkan kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, analisis perkembangan kepadatan penduduk pada beberapa provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Bali menjadi penting untuk memahami tren perubahan kepadatan penduduk serta dampaknya terhadap kemiskinan multidimensi dari waktu ke waktu.

Gambar 1 3 Grafik Kepadatan Penduduk di Indonesia



Sumber : BPS Proyeksi Penduduk, 2025

Grafik Kepadatan penduduk di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah, yang mencerminkan ketimpangan distribusi penduduk serta tekanan terhadap sumber daya di masing-masing daerah. Berdasarkan data kepadatan penduduk pada lima provinsi selama periode 2015–2024, terlihat bahwa seluruh wilayah mengalami tren peningkatan dari waktu ke waktu. Jawa Tengah dan DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan relatif tinggi, di mana Jawa Tengah meningkat dari 17,49 menjadi 18,59, sedangkan DKI Jakarta meningkat dari 5,31 menjadi 5,73. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur dan Bali berada pada kategori menengah dengan tren yang juga meningkat, masing-masing dari 2,67 menjadi 3,08 dan dari 2,17 menjadi 2,40. Di sisi lain, Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah, namun tetap menunjukkan peningkatan dari 1,64 menjadi 1,96 selama periode pengamatan.

Peningkatan kepadatan penduduk tersebut menunjukkan adanya tekanan yang semakin besar terhadap ketersediaan lahan, perumahan, serta fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Dalam perspektif kemiskinan multidimensi, kondisi ini dapat meningkatkan risiko deprivasi pada berbagai

dimensi kesejahteraan apabila tidak diimbangi dengan pemerataan infrastruktur dan layanan dasar (Mastrorillo et al., 2024).

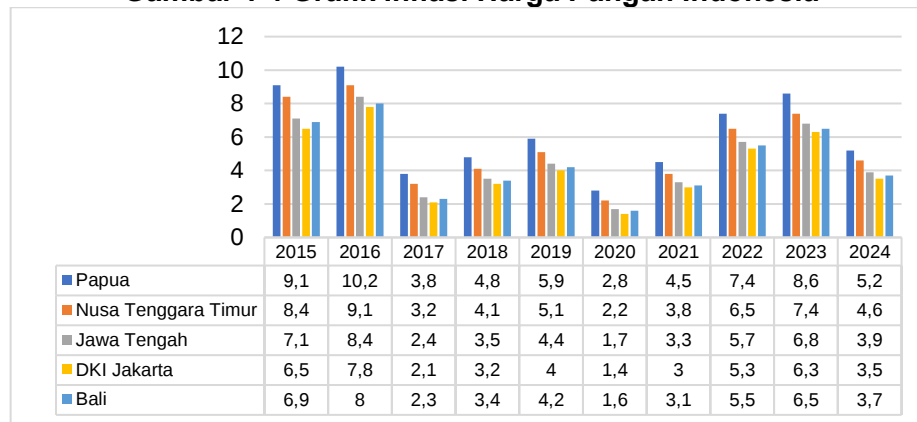
Selain itu, wilayah dengan kepadatan tinggi cenderung menghadapi persaingan yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan dan akses terhadap sumber daya, sehingga berpotensi meningkatkan kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk memiliki hubungan positif dengan kemiskinan multidimensi melalui tekanan terhadap kualitas hunian dan akses layanan dasar (Putri, 2024) dan (Muñetón-Santa & Manrique-Ruiz, 2023). Oleh karena itu, analisis kepadatan penduduk menjadi penting dalam memahami dinamika kemiskinan multidimensi di Indonesia.

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil proyeksi dan penyesuaian tren yang mengacu pada publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Peningkatan kepadatan penduduk tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk alami, urbanisasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi di suatu wilayah (Arwanto & Wibowo, 2025). Kondisi ini berpotensi memberikan dampak terhadap penggunaan lahan, kebutuhan fasilitas publik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang mampu mengelola pertumbuhan penduduk secara efektif agar tidak menimbulkan tekanan terhadap sumber daya yang tersedia. Apabila peningkatan kepadatan penduduk tidak diimbangi dengan pemerataan infrastruktur dan akses layanan dasar, maka kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko deprivasi pada berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian dari kemiskinan multidimensi.

Faktor lain yang juga berperan dalam memengaruhi kemiskinan multidimensi adalah guncangan harga pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar dengan proporsi pengeluaran yang relatif besar dalam rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga perubahan harga pangan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Ainistikmalia et al., 2022). Ketika harga pangan meningkat, rumah tangga miskin umumnya melakukan strategi penyesuaian dengan mengurangi konsumsi pangan berkualitas, menekan pengeluaran nonpangan, atau menunda pemenuhan kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Mekanisme bertahan tersebut dapat menurunkan kualitas hidup secara bertahap dan meningkatkan risiko terjadinya deprivasi pada berbagai dimensi kesejahteraan, sehingga memperbesar kemungkinan rumah tangga mengalami kemiskinan multidimensi.

Inflasi harga pangan merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan stabilitas harga kebutuhan pokok dalam perekonomian. Perubahan harga komoditas pangan mencerminkan adanya tekanan pada sisi konsumsi rumah tangga serta kondisi pasar yang dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (S. Pratiwi, 2023). Dalam penelitian ini, inflasi harga pangan digunakan sebagai indikator untuk melihat besarnya guncangan harga yang berpotensi memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perkembangan inflasi harga pangan perlu dianalisis untuk mengetahui dinamika perubahan harga dari waktu ke waktu serta keterkaitannya dengan kemiskinan multidimensi.

Gambar 1 4 Grafik Inflasi Harga Pangan Indonesia



Sumber : BPS IHK, 2025

Berdasarkan grafik inflasi harga pangan pada lima provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024, terlihat bahwa pergerakan inflasi menunjukkan pola yang fluktuatif baik antar waktu maupun antar wilayah. Provinsi Papua secara konsisten mencatat tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, dengan puncak inflasi mencapai 10,2% pada tahun 2016 serta kembali meningkat pada periode 2022–2023 hingga sekitar 8,6%. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan pola yang serupa dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi, meskipun secara umum masih berada di bawah Papua.

Provinsi seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Bali menunjukkan tingkat inflasi yang relatif lebih stabil dan terkendali. DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki kisaran inflasi pangan yang lebih rendah, yaitu antara 1,4% hingga 7,8%. Bali dan Jawa Tengah juga memperlihatkan pola fluktuasi yang lebih moderat, yang mencerminkan kondisi distribusi dan stabilitas harga yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum, inflasi harga pangan pada kelima provinsi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode 2020, yang diduga berkaitan dengan melemahnya permintaan selama pandemi. Namun, inflasi kembali meningkat pada periode

2022–2023 akibat tekanan global serta gangguan pada rantai pasok. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan di Indonesia masih rentan terhadap berbagai faktor eksternal maupun domestik, seperti distribusi, produksi, dan kebijakan pemerintah.

Dalam perspektif ekonomi kesejahteraan, fluktuasi inflasi pangan memiliki implikasi penting terhadap kemiskinan multidimensi. Kenaikan harga pangan secara langsung menurunkan daya beli rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah yang memiliki proporsi pengeluaran pangan lebih besar. Akibatnya, rumah tangga cenderung mengurangi konsumsi kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan risiko deprivasi pada berbagai dimensi kesejahteraan (Headey & Ruel, 2023) dan (S. Pratiwi, 2023).

Data inflasi harga pangan provinsi dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan distribusi regional dengan mengacu pada pola inflasi kelompok makanan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), serta mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi dan akses distribusi antar wilayah. Fluktuasi harga pangan tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai faktor ekonomi maupun non-ekonomi, seperti perubahan iklim, gangguan distribusi, serta dinamika pasar global. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi stabilitas harga, tetapi juga berdampak langsung pada daya beli rumah tangga, terutama kelompok miskin yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam menyesuaikan pengeluaran ketika harga pangan meningkat. Dalam kondisi tersebut, rumah tangga miskin cenderung melakukan penyesuaian konsumsi dengan mengurangi kualitas maupun kuantitas pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengendalian inflasi yang

efektif, khususnya pada sektor pangan, agar stabilitas harga tetap terjaga dan risiko terjadinya deprivasi pada berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat dapat diminimalkan.

Penelitian mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan variabel. (Alkire & Foster, 2011) mengembangkan metode *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup deprivasi dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup sehingga pengukurannya menjadi lebih komprehensif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa berbagai faktor struktural di luar pendapatan, termasuk kondisi ketenagakerjaan, dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Selain dimensi kesehatan dan pendidikan, aspek ketenagakerjaan juga menjadi determinan krusial karena berhubungan langsung dengan kemampuan rumah tangga dalam mempertahankan akses terhadap kebutuhan dasar. Sementara itu penelitian oleh (Brata, 2010), menunjukkan bahwa tingginya proporsi tenaga kerja di sektor informal di Indonesia meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga akibat pendapatan yang tidak stabil, minim perlindungan sosial, dan terbatasnya akses terhadap fasilitas kesejahteraan, sehingga rumah tangga yang bergantung pada sektor ini lebih rentan mengalami kemiskinan, terutama ketika terjadi guncangan ekonomi.

Penelitian oleh (Rahmulyana et al., 2024) menemukan bahwa kepadatan penduduk memengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui tekanan terhadap ketersediaan infrastruktur dan layanan publik. Wilayah dengan kepadatan tinggi cenderung menghadapi keterbatasan perumahan layak, sanitasi, serta fasilitas

pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan risiko deprivasi pada berbagai dimensi kesejahteraan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor demografis memiliki keterkaitan langsung dengan kemiskinan multidimensi karena kepadatan penduduk dapat memperbesar tekanan terhadap akses layanan dasar.

Penelitian (Warr & Yusuf, 2014) serta (Lustig, 2016) menunjukkan bahwa kenaikan maupun fluktuasi harga pangan berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena rumah tangga berpendapatan rendah memiliki keterbatasan kemampuan menyesuaikan pengeluaran ketika harga pangan meningkat, sehingga mereka cenderung mengurangi konsumsi kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

(Klasen, 2017) menegaskan bahwa pendekatan kemiskinan multidimensi memberikan gambaran kesejahteraan yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan moneter karena mampu menangkap berbagai bentuk deprivasi yang dialami rumah tangga. Penelitian tersebut menekankan bahwa faktor struktural seperti kondisi ketenagakerjaan, karakteristik demografis, dan akses terhadap layanan dasar merupakan determinan penting dalam menjelaskan tingkat kemiskinan multidimensi.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada kemiskinan yang diukur melalui pendekatan moneter atau tingkat pendapatan semata. Kajian yang menganalisis kemiskinan melalui pendekatan multidimensi dengan mempertimbangkan berbagai faktor struktural seperti kerentanan pekerjaan

informal, kepadatan penduduk, serta guncangan harga pangan secara simultan masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian cenderung menganalisis faktor-faktor tersebut secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan muncul karena sebagian besar kajian terdahulu masih cenderung membahas faktor-faktor penentu kemiskinan secara parsial. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti satu aspek tertentu, seperti ketenagakerjaan, kondisi demografis, atau perubahan harga pangan, sehingga belum banyak studi yang mengintegrasikan variabel makro, demografi, dan mikro-struktural dalam satu model analisis kemiskinan multidimensi di Indonesia. Padahal, kemiskinan multidimensi merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor secara simultan. Oleh karena itu, penelitian yang menggabungkan kerentanan pekerjaan informal, kepadatan penduduk, serta guncangan harga pangan dalam satu model ekonometrika diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kemiskinan multidimensi di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian kemiskinan multidimensi dengan menganalisis secara empiris pengaruh kerentanan pekerjaan informal, kepadatan penduduk, dan guncangan harga pangan terhadap kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis data panel, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

hubungan antara faktor ketenagakerjaan, kondisi demografis, serta dinamika harga pangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain memberikan kontribusi akademik, penelitian ini juga memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks perumusan kebijakan pembangunan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan multidimensi sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam penelitian ini, penggunaan data panel menjadi penting karena mampu menangkap perbedaan karakteristik serta perubahan kondisi dari waktu ke waktu, sehingga heterogenitas wilayah yang tidak dapat dijelaskan oleh data agregat nasional dapat dianalisis secara lebih akurat.

Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pengaruh kerentanan pekerjaan informal, kepadatan penduduk, dan guncangan harga pangan pada masing-masing wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kerentanan pekerjaan informal terhadap kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia?

2. Bagaimana kontribusi kepadatan penduduk dalam memengaruhi tingkat kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh inflasi harga pangan terhadap kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh kerentanan pekerjaan informal, kepadatan penduduk, dan inflasi harga pangan secara simultan terhadap kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kerentanan pekerjaan informal terhadap kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia.
2. Melihat kontribusi kepadatan penduduk dalam memengaruhi tingkat kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia
3. Menganalisis pengaruh inflasi harga pangan terhadap kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh kerentanan pekerjaan informal, kepadatan penduduk, dan inflasi harga pangan secara simultan terhadap kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan analisis kemiskinan multidimensi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

seperti kerentanan pekerjaan informal, kepadatan penduduk, dan inflasi harga pangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek pendapatan, tetapi juga pada perbaikan kondisi ketenagakerjaan, pengelolaan kependudukan, serta stabilitas harga pangan.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemiskinan multidimensi serta faktor-faktor yang memengaruhinya, khususnya dalam penggunaan pendekatan analisis data panel pada studi ekonomi pembangunan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menganalisis kemiskinan multidimensi di 5 Provinsi Indonesia sebagai variabel dependen.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kerentanan pekerjaan informal, kepadatan penduduk, dan inflasi harga pangan.
3. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Sakernas, Susenas, dan sumber data terkait lainnya.
4. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2015–2024.

5. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel di 5 Provinsi Indonesia.